

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Tugas Pendamping Skripsi



UNIVERSITAS GALUH

FAKULTAS EKONOMI

PROGRAM STUDI MANAJEMEN : TERAKREDITASI "B" SK. NO. 5278/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020
 PROGRAM STUDI AKUNTANSI : TERAKREDITASI "B" SK. NO. 4682/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2020
 Jl. RE. Martadinata No. 150 Telp/Fax. (0265) 772060 - 778374 Ciamis 46251

SURAT TUGAS MEMBIMBING SKRIPSI
 Nomor : 2700/34/ST/AK/D/X/2025

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Galuh Ciamis dengan ini memberi tugas membimbing skripsi kepada :

Nama : **Mukhtar Abdul Kader, S.E., M.M.**
 sebagai Pembimbing I

Nama : **M. Zaki Rahman, S.Ag., M.Ag., M.M.**
 sebagai Pembimbing II

Dalam penulisan/penyusunan skripsi mahasiswa untuk dan atas :

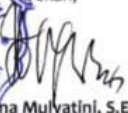
Nama : **NURUL NAILA AGUSTIN**
 NIM : 3402220183
 Program Studi : **Manajemen**
 Judul Skripsi : **PENGEMBANGAN MODEL GREEN HRM UNTUK MENINGKATKAN KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN DI INSTANSI PEMERINTAH INDONESIA: STUDI KASUS DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANJAR**

Surat tugas ini berlaku sampai dengan skripsi selesai paling lambat 1 (satu) tahun setelah penetapan surat tugas ini.

Demikian agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ciamis, 29 Oktober 2025

Dekan,



Dr. Nurdiana Mulyatini, S.E., M.M.
 NIK. 3112770079

Tembusan :

- Yth. Ketua Program Studi yang bersangkutan
- Yth. Mahasiswa yang bersangkutan

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian



UNIVERSITAS GALUH FAKULTAS EKONOMI

PROGRAM STUDI MANAJEMEN : TERAKREDITASI "B" SK. NO. 5278/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020
PROGRAM STUDI AKUNTANSI : TERAKREDITASI "B" SK. NO. 4682/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2020

Jl. RE. Martadinata No. 150 Telp/Fax. (0265) 772060 - 778374 Ciamis 46251

Nomor	: 2964/34/SP/AK/DI/XI/2025	08 November 2025
Lampiran	: -	
Perihal	: Ijin Penelitian Skripsi	

Kepada
 Yth.
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Banjar
 di
 Tempat

Dengan Hormat,
 Berdasarkan Program Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Galuh Ciamis, dalam rangka menyelesaikan studi mahasiswa diwajibkan untuk menyusun skripsi. Untuk keperluan tersebut kiranya Bapak/Ibu dapat membantu mahasiswa kami dalam melakukan penelitian dan pengumpulan data. Adapun mahasiswa yang dimaksud adalah:

Nama	: Nurul Naila Agustin
Nomor Pokok / NIM	: 3402220183
Asal Program Studi	: Manajemen
Tempat Tanggal Lahir	: Ciamis, 16 Agustus 2004
Telepon / HP	: 082125593531
Alamat	: Citapen Pasir, Desa Sukajaya RT/RW 02/01 Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis
Lamanya Penelitian	: November 2025 - Januari 2026
Judul Penelitian	: Pengembangan Model Green HRM untuk Meningkatkan Keberlanjutan Lingkungan di Instansi Pemerintah Indonesia (Studi Kasus di Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjar)

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ciamis, 08 November 2025

a.n Dekan,
 Wakil Dekan I


Elin Herlina, S.Pd., M.M.
 NIK. 312770081

Lampiran 3 Surat Balasan Penelitian



PEMERINTAH KOTA BANJAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Gerilya Komplek Perkantoran Pamongkoran Kota Banjar 46311
 Telp (0265) 7486026 E-mail : badankesbangpolbanjar@gmailcom

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : T/000.9/2142/SKP-Kesbangpol/2025

Dasar	: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
Menimbang	: Surat dari : Universitas Galuh Ciamis Fakultas Ekonomi Nomor : 2964/34/SP/AK/D/X/2025 Tanggal : 8 November 2025 Hal : Ijin Penelitian Skripsi
Nama	: NURUL NAILA AGUSTIN
NIM	: 3402220183
Alamat	: Dsn. Citapen Pasir RT 002 RW 001 Desa Sukajaya, Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis
Pekerjaan	: Mahasiswi
No. Telepon	: +62 82125593531
Judul Penelitian	: Pengembangan Model <i>Green HRM</i> untuk Meningkatkan Keberlanjutan Lingkungan di Instansi Pemerintah Indonesia (Studi Kasus di Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjar)
Bidang Penelitian	: Manajemen Sumber Daya Manusia
Lokasi Penelitian	: Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjar
Waktu Penelitian	: 21 November 2025 - 21 Januari 2026
Status Penelitian	: Baru

Banjar, 21 November 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh:

a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,
 KEPALA BIDANG KESATUAN BANGSA



FERRYANGGA KOSTRADINI, S.I.P., M.A.P.
 PEMBINA

**ketentuan penelitian dihalaman belakang dan tembusan*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dan terdaftar di <https://e-office.banjarkota.go.id>, dengan kode: NTEXZTK0Y



MELAKUKAN PENELITIAN, DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT:

1. Sebelum melakukan kegiatan penelitian harus melaporkan kedatangannya Kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjar yang dituju dengan menunjukkan surat pemberitahuan ini;
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud;
3. Harus mentaati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat yang berlaku;
4. Peneliti harus mempresentasikan hasil penelitiannya di Pemerintah Daerah dan memberikan hasil penelitian;
5. Apabila masa berlaku surat keterangan ini berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan penelitian harus diajukan kepada instansi pemohon;
6. Surat keterangan ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Pemberitahuan tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas;
7. Surat ini berlaku sampai dengan tanggal 21 Januari 2026.

Tembusan:

- Yth. 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar;
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjar.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dan terdaftar di <https://e-office.banjarkota.go.id> dengan kode: NTEXZTK0Y



Lampiran 4 Surat Ijin Perpanjangan Waktu Penelitian



UNIVERSITAS GALUH FAKULTAS EKONOMI

PROGRAM STUDI MANAJEMEN : TERAKREDITASI "B" SK. NO. 5278/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020
PROGRAM STUDI AKUNTANSI : TERAKREDITASI "B" SK. NO. 4682/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2020
Jl. RE. Martadinata No. 150 Telp/Fax. (0265) 772060 - 778374 Ciamis 46251

Nomor : 183/34/SP/AK/DI/II/2026
Lampiran : -
Perihal : Perpanjangan Penelitian Skripsi

Kepada Yth.
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Kota Banjar
di
Tempat

Dengan Hormat,
Berdasarkan Program Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Galuh Ciamis, dalam rangka menyelesaikan studi mahasiswa diwajibkan untuk menyusun skripsi. Untuk keperluan tersebut kiranya Bapak/Ibu dapat membantu mahasiswa kami dalam melakukan penelitian dan pengumpulan data. Adapun mahasiswa yang dimaksud adalah:

N a m a	: Nurul Naila Agustin
Nomor Pokok / NIM	: 3402220183
Asal Program Studi	: Manajemen
Tempat Tanggal Lahir	: Ciamis, 16 Agustus 2004
Telepon / HP	: 082125593531
Alamat	: Citapen Pasir, Desa Sukajaya RT/RW 02/01 Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis
Lamanya Penelitian	: 3 Bulan
Judul Penelitian	: Pengembangan Model Green HRM Untuk Meningkatkan Keberlanjutan Lingkungan di Instansi Pemerintah Indonesia (Studi Kasus di Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjar)

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ciamis, 09 Februari 2026

a.n Dekan,
Wakil Dekan I


Elin Herlina, S.Pd., M.M.
 NIK. 3112770081

Lampiran 5 Surat Balasan Perpanjangan Waktu Penelitian



PEMERINTAH KOTA BANJAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jalan Gerilya Komplek Perkantoran Pamongkoran Kota Banjar 46311
 Telp (0265) 7486026 E-mail : badankesbangpolbanjar@gmailcom

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
 Nomor : T/000.9/167/KESBANG/2026

Dasar	: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
Menimbang	: Surat dari : Universitas Galuh Ciamis Fakultas Ekonomi Nomor : 183/34/SP/AK/DI/II/2026 Tanggal : 9 Februari 2026 Hal : Perpanjangan Penelitian Skripsi
Nama	: NURUL NAILA AGUSTIN
NIM	: 3402220183
Alamat	: Dsn. Citapen Pasir RT 002 RW 001 Desa Sukajaya, Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis
Pekerjaan	: Mahasiswi
No. Telepon	: +62 82125593531
Judul Penelitian	: Pengembangan Model Green HRM untuk Meningkatkan Keberlanjutan Lingkungan di Instansi Pemerintah Indonesia (Studi Kasus di Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjar)
Bidang Penelitian	: Manajemen Sumber Daya Manusia
Lokasi Penelitian	: Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjar
Waktu Penelitian	: 10 Februari - 10 April 2026
Status Penelitian	: Perpanjangan

Banjar, 11 Februari 2026
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar,



WAWAN SETIAWAN, S.H.,M.SI
 Pembina Tingkat I (IVb)
 NIP. 197011052003121007

**ketentuan penelitian dihalaman belakang dan tembusan*

MELAKUKAN PENELITIAN, DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT:

1. Sebelum melakukan kegiatan penelitian harus melaporkan kedatangannya Kepada Kepala Instansi/Lembaga/Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjar yang dituju dengan menunjukkan surat pemberitahuan ini;
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud;
3. Harus mentaati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat yang berlaku;
4. Peneliti harus mempresentasikan hasil penelitiannya di Pemerintah Daerah dan memberikan hasil penelitian;
5. Apabila masa berlaku surat keterangan ini berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan penelitian harus diajukan kepada instansi pemohon;
6. Surat keterangan ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Pemberitahuan tidak menaati/mengingkarkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas;
7. Surat ini berlaku sampai dengan tanggal 10 April 2026.

Tembusan:

Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjar.

Lampiran 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 2009

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
 - c. bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan;
 - e. bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

f. bahwa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- f. bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

2. perlindungan . . .

Lampiran 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara



SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara belum berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik;

c. bahwa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- c. bahwa untuk mewujudkan aparatur sipil negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, perlu ditetapkan aparatur sipil negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara;
- d. bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sudah tidak sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara;

Mengingat : Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I . . .

Lampiran 8 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.76/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2021 tentang ADIPURA.



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1617, 2019

KEMEN-LHK. Adipura.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.76/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019

TENTANG

ADIPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kabupaten/kota yang memiliki kualitas lingkungan hidup yang bersih, teduh dan berkelanjutan maka pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau, setiap kabupaten/kota wajib menyusun kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah dan penetapan ruang terbuka hijau;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Menteri berwenang menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan efektivitas pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau melalui adipura;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Adipura;

2019, No. 1617

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG ADIPURA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Adipura adalah instrumen pengawasan kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau dalam mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang bersih, teduh, dan berkelanjutan.
2. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
3. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
4. Ruang Terbuka Hijau adalah ruang terbuka hijau publik yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
5. Periode Pemantauan adalah rentang waktu pemantauan Adipura yang dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berjalan.
6. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
7. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah dan kebijakan strategi dalam pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.
8. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman

GOL/ RUANG	SEKRETARIAT		BIDANG PENATAAN, PENINGKATAN KAPASITAS DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN		BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI		UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP		UPTD TEMPAT PEMROSE SAN AKHIR		JUMLAH		TOTAL
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
III/d	-	-	1	2	1	1	-	1	-	-	-	-	2	4	6
IV/a	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	3	1	4
IV/b	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
IV/c	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PNS	9	6	6	4	6	3	10	5	3	1	3	-	37	19	56
I	4	-	-	-	-	-	79	59	1	-	-	4	84	64	148
V	2	4	-	1	-	-	17	6	1	2	1	6	21	19	40
VII	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	-	3
IX	2	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	2	3	2	5
PPPK	9	4	-	2	-	-	97	66	2	3	2	12	110	87	197
PPPK Paruh Waktu	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	2
Jumlah	18	10	6	6	6	3	107	71	5	4	9	2	148	107	255
TOTAL	28		12		9		178		9		17		255		

Sumber: Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan DLH (2025)

Pada Tujuan Menurunkan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (Tujuan 3) terdapat 1 (satu) indikator yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota. Tingkat capaian kinerja indikator tujuan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota pada tahun 2024 adalah 102,66%. Realisasinya sebesar 62,60 indeks dari target yang direncanakan sebesar 60,98 indeks.

Struktur perhitungan IKLH berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), berikut hasil perhitungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjar:

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota

$$IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$$

Kategori:

Skor 90 - 100	: Sangat Baik
Skor 70 – 89,9	: Baik
Skor 50 – 69,9	: Sedang
Skor 25 – 49,9	: Kurang
Skor 0 – 24,9	: Sangat Kurang

$$\begin{aligned}
 IKLH &= (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL) \\
 &= (0.376 \times 51,05) + (0.405 \times 89,58) + (0.219 \times 32,53) \\
 &= (19,20) + (36,28) + (7,12) \\
 &= 62,60 \text{ (**SEDANG**)}
 \end{aligned}$$

BAB III

CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

A. Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran

Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjar Triwulan IV dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1 Uraian Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2024

Uraian	Indikator	Target	Realisasi Kinerja Triwulan ke IV
Tujuan: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah			
Sasaran: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Pertumbuhan Nilai Sakip DLH	72,75	76,70
Tujuan: Meningkatkan Kualitas SPM Perumahan Rakyat	Capaian SPM Perumahan Rakyat		
Sasaran: Berkurangnya Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	2,59%	2,85%
Tujuan: Menurunkan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota		
Sasaran: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pertanahan	Tersedianya Data Pertanahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kab/Kota	1 dok	1 dok
Sasaran: Meningkatnya Ketaatan Penanggungjawab Usaha/Kegiatan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha/ Kegiatan terhadap Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	90%	90%
Sasaran: Meningkatnya Kesadaran Peduli Lingkungan Hidup dan Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim	Jumlah Penghargaan Peduli Lingkungan dan Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim	1 penghargaan	1 Penghargaan

Sasaran: Meningkatnya Fungsi RTH Perkotaan	Persentase RTH	33,19%	33,19%
Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sampah	Persentase Penanganan Sampah	71%	76,08%
	Persentase Pengurangan Sampah	28%	21,63%

Sampai dengan Triwulan IV, Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjar sebesar 76,70 sesuai dengan nilai yang tertera dalam Laporan Hasil Evaluasi AKIP terbaru dari Inspektorat. Sasaran Berkurangnya Jumlah Rumah Tidak Layak Huni sebesar 2,85% yang diperoleh dari pembagian antara jumlah RTLH di Kota Banjar yaitu 1.487 unit dengan Jumlah Rumah di Kota Banjar yaitu 52.124 unit. Dan sasaran Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pertanahan terealisasi sebanyak 1 dokumen data pertanahan.

Adapun realisasi untuk sasaran Meningkatkan Ketaatan Penanggungjawab Usaha/ Kegiatan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup telah memenuhi target yaitu sebesar 90%. Sasaran Meningkatkan Kesadaran Peduli Lingkungan Hidup dan Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim terealisasi sebanyak 1 penghargaan yaitu berupa Penghargaan Proklamasi Madya Dusun Girimukti Desa Sukamukti.

Sasaran Meningkatkan Fungsi RTH Perkotaan terealisasi sebesar 33,19% sama seperti tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan Kawasan RTH yang dikelola tidak ada penambahan lokasi. Sedangkan sasaran Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sampah terbagi menjadi dua indikator, yang terdiri dari Persentase Penanganan Sampah dengan realisasi sebesar 76,08% dan Persentase Pengurangan Sampah dengan realisasi sebesar 21,63%.

a	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	2 dok	0.136.696	1 dok	0	50	0
b	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPPLH di Kabupaten/Kota yang Berisi Arahan/Muatan RPPLH Kabupaten/Kota dan Mengakomodir Arahan RPPLH Provinsi	0	0	0	0	0	0
2	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Cakupan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	100%	270.000.000	25%	111.429.750	25	41,27
a	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD	1 dok	270.000.000	1 dok	111.429.750	100	41,27
VII	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	61,51 point	964.640.013	62,60 point	743.485.230	101,77	77,07
1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks kualitas air (IKA) (Indeks)	50,58 point		51,05 point		100,93	
		Indeks Kualitas Udara (IKU) (Indeks)	87,86 point	954.503.317	88,58 point	734.420.130	101,96	76,94
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) (Indeks)	31,53 point		32,53 point		103,17	
			100%		19,16%		19,16	

Lampiran 10 Pedoman Wawancara

WAWANCARA DENGAN NARASUMBER DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANJAR

Responden Yth,

Saya Nurul Naila Agustin, Mahasiswi Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Galuh, saat ini sedang melakukan penelitian Tugas Akhir dengan judul: **“PENGEMBANGAN MODEL *GREEN HRM* UNTUK MENINGKATKAN KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN DI INSTANSI PEMERINTAH INDONESIA (STUDI KASUS DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANJAR).”** Untuk itu, saya mohon izin kepada Bapak/Ibu untuk bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

1. *Green Training and Development*

1. Bagaimana bentuk pembinaan, sosialisasi, atau edukasi yang diberikan kepada pegawai terkait isu lingkungan hidup di DLH Kota Banjar?
2. Apakah kegiatan edukasi tersebut dilakukan secara rutin atau bersifat insidental?
3. Sejauh mana materi pembinaan atau pelatihan yang diberikan relevan dengan tugas teknis pegawai di DLH?
4. Apakah materi tersebut membantu pegawai dalam menjalankan tugas operasional terkait pengelolaan lingkungan?
5. Apakah terdapat perubahan perilaku kerja pegawai setelah mengikuti pembinaan atau sosialisasi lingkungan?
6. Apakah pegawai pernah menunjukkan inisiatif mandiri dalam menerapkan praktik kerja ramah lingkungan?

2. *Green Performance and Reward System*

1. Apakah aspek kepedulian terhadap lingkungan hidup menjadi bagian dari penilaian kinerja atau perilaku kerja pegawai?
2. Bagaimana bentuk penilaian tersebut diterapkan dalam praktik sehari-hari?
3. Apakah terdapat bentuk apresiasi atau penghargaan bagi pegawai yang menunjukkan perilaku kerja ramah lingkungan?
4. Apakah penghargaan tersebut bersifat formal atau informal?
5. Bagaimana pengaruh apresiasi atau penghargaan tersebut terhadap motivasi pegawai?

3. *Green Employee Involvement*

1. Bagaimana bentuk keterlibatan pegawai dalam program atau kegiatan lingkungan di lingkungan DLH?
2. Apakah partisipasi tersebut bersifat rutin atau hanya pada kegiatan tertentu saja?
3. Bagaimana peran pimpinan dalam mendorong perilaku kerja ramah lingkungan di DLH?
4. Apakah pimpinan memberikan ruang bagi pegawai untuk menyampaikan ide atau inovasi lingkungan?

4. Kualitas Air

1. Bagaimana praktik penggunaan dan penghematan air bersih di lingkungan kantor DLH?
2. Apakah terdapat kebijakan atau kebiasaan tertentu terkait efisiensi penggunaan air?
3. Bagaimana sistem pengelolaan limbah cair hasil kegiatan operasional di DLH?

5. Efisiensi dan Penggunaan Energi

1. Apakah terdapat kebijakan atau imbauan terkait penghematan energi listrik di lingkungan DLH?
2. Bagaimana penerapan kebijakan tersebut dalam aktivitas kerja sehari-hari?
3. Bagaimana kesadaran pegawai dalam menggunakan listrik dan peralatan elektronik secara efisien?
4. Faktor apa yang mempengaruhi perilaku pegawai dalam menghemat energi?

6. Emisi Gas Rumah Kaca

1. Apakah terdapat upaya untuk mengurangi emisi dari penggunaan kendaraan operasional dinas?
2. Bagaimana efektivitas upaya tersebut dalam praktik?
3. Apakah DLH telah menggunakan teknologi atau peralatan kerja yang ramah lingkungan?
4. Kendala apa yang dihadapi dalam penerapan teknologi rendah emisi?

7. Pengelolaan Sampah dan Limbah (3R)

1. Bagaimana sistem pemilahan sampah yang diterapkan di lingkungan kantor DLH?
2. Sejauh mana digitalisasi dokumen diterapkan untuk mengurangi penggunaan kertas?
3. Bagaimana partisipasi dan kebiasaan pegawai dalam mengurangi penggunaan plastik sekali pakai?

8. Kualitas Udara dan Pengendalian Polusi

1. Bagaimana upaya penataan ruang hijau di lingkungan kantor DLH?

2. Apakah keberadaan tanaman kantor dirasakan memberi dampak terhadap kenyamanan kerja?
3. Apakah terdapat kebijakan kawasan tanpa rokok di lingkungan DLH?
4. Bagaimana pelaksanaan dan pengawasannya di lapangan?

9. Konservasi Keanekaragaman Hayati

1. Bagaimana keterlibatan pegawai dalam program penghijauan atau konservasi lingkungan?
2. Apakah kegiatan tersebut menjadi bagian dari tugas rutin atau bersifat insidental?
3. Apakah pegawai DLH terlibat dalam kegiatan edukasi lingkungan kepada masyarakat?
4. Bagaimana bentuk peran pegawai dalam kegiatan tersebut?

10. Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan

1. Apakah dalam pengadaan barang dan jasa telah mempertimbangkan aspek ramah lingkungan?
2. Apakah terdapat inovasi dalam pemanfaatan sumber daya alam atau sarana kantor secara bijak?
3. Apa kendala utama dalam menerapkan prinsip pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan?

Lampiran 11 Hasil Penelitian Mengenai Pengembangan Model *Green HRM* di Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjar

No	Indikator	Pertanyaan Wawancara	Reduksi Data	Data Display (Analisis Tematik)	Penarikan Simpulan/ Verifikasi
1	<i>Green Training and Development</i>	1. Bagaimana bentuk pembinaan, sosialisasi, atau edukasi yang diberikan kepada pegawai terkait isu lingkungan hidup di DLH Kota Banjar? 2. Apakah kegiatan edukasi tersebut dilakukan secara rutin atau bersifat insidental? 3. Sejauh mana materi pembinaan atau pelatihan yang diberikan relevan dengan tugas teknis pegawai di DLH? 4. Apakah materi tersebut membantu pegawai	Informan 1 : 1. Pembinaan dilakukan secara indoor (apel pagi, rapat) dan outdoor (edukasi langsung ke lapangan). Pendekatan personal karena mayoritas pegawai lulusan SD. 2. Dilakukan secara rutin karena pegawai membutuhkan arahan pimpinan. 3. Materi relevan dengan tugas teknis. Pegawai skil mengikuti webinar, non-skil diberi arahan langsung. 4. Membantu pelaksanaan tugas operasional	1. Pembinaan bersifat informal, situasional, dan berbasis arahan pimpinan. 2. Tidak terdapat standar frekuensi atau modul pelatihan tetap. 3. Pengembangan kompetensi berjalan secara individual, bukan program kelembagaan. 4. Perubahan terjadi karena arahan pimpinan dan penambahan wawasan melalui webinar. 5. Partisipasi aktif belum sepenuhnya otonom.	Berdasarkan hasil triangulasi empat informan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan <i>Green Training and Development</i> di DLH Kota Banjar belum terintegrasi secara formal dalam sistem pengembangan sumber daya manusia. Pembinaan dan edukasi terkait isu lingkungan lebih banyak dilakukan melalui pendekatan informal seperti apel pagi, rapat, serta arahan langsung pimpinan di lapangan. Meskipun sebagian besar informan menyatakan kegiatan tersebut dilakukan secara rutin, tidak ditemukan adanya kurikulum, modul pelatihan,

No	Indikator	Pertanyaan Wawancara	Reduksi Data	Data Display (Analisis Tematik)	Penarikan Simpulan/ Verifikasi
		dalam menjalankan tugas operasional terkait pengelolaan lingkungan ? 5. Apakah terdapat perubahan perilaku kerja pegawai setelah mengikuti pembinaan atau sosialisasi lingkungan ? 6. Apakah pegawai pernah menunjukkan inisiatif mandiri dalam menerapkan praktik kerja ramah lingkungan ?	5. Terdapat perubahan perilaku melalui webinar dan arahan pimpinan. 6. Ada inisiatif, tetapi belum merata. Masih perlu dorongan pimpinan. Informan 2 : 1. Tidak ada sosialisasi khusus internal, fokus edukasi lebih ke masyarakat . Hanya pengingat informal dalam kegiatan sehari-hari. 2. Bersifat insidental, tidak rutin. 3. Tidak ada materi khusus. pegawai mengikuti webinar sesuai tupoksi. 4. Membantu peningkatan kualitas kerja.		maupun standar frekuensi yang terdokumentasi secara kelembagaan. Materi yang diberikan umumnya bersifat situasional dan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing pegawai, termasuk melalui partisipasi dalam webinar. Namun demikian, belum terdapat desain kompetensi hijau (<i>green competency framework</i>) yang terstruktur dalam kebijakan SDM. Perubahan perilaku kerja memang diakui terjadi, tetapi perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh arahan pimpinan dan peningkatan wawasan individual, bukan karena adanya sistem pelatihan yang terlembagakan. Dengan demikian, implementasi

No	Indikator	Pertanyaan Wawancara	Reduksi Data	Data Display (Analisis Tematik)	Penarikan Simpulan/ Verifikasi
			5. Ada perubahan, didorong atasan. 6. Ada, namun belum merata. perlu dorongan atasan. Informan 3 : 1. Dilakukan melalui apel pagi dan rapat. 2. Dilakukan rutin karena pegawai membutuhkan arahan atasan. 3. Tidak ada materi spesifik. webinar sesuai tupoksi dan pegawai lapangan diarahkan langsung oleh atasan. 4. Membantu pelaksanaan tugas. 5. Ada perubahan perilaku. 6. Ada, tetapi masih bergantung pada atasan. Informan 4 :		<i>Green Training</i> di DLH Kota Banjar masih bersifat <i>leadership-driven</i> dan belum berbasis <i>system-based approach</i> yang berkelanjutan.

No	Indikator	Pertanyaan Wawancara	Reduksi Data	Data Display (Analisis Tematik)	Penarikan Simpulan/ Verifikasi
			1. Tidak ada sosialisasi khusus, arahan diberikan saat apel pagi dan rapat. 2. Edukasi dan arahan dilakukan rutin. 3. Tidak ada materi khusus webinar sesuai tupoksi; pegawai lapangan diarahkan langsung. 4. Membantu pelaksanaan tugas. 5. Ada perubahan perilaku. 6. Ada, tetapi bergantung pada atasan.		
2	<i>Green Performance and Reward System</i>	1. Apakah aspek kepedulian terhadap lingkungan hidup menjadi bagian dari penilaian kinerja atau perilaku kerja pegawai?	Informan 1 : 1. Aspek kepedulian lingkungan masuk dalam perilaku kerja dan dinilai melalui aplikasi E-Kinerja dan catatan lapangan. 2. Laporan kegiatan	1. Aspek lingkungan bersifat implisit dalam sistem E-Kinerja. 2. Sistem penilaian formal telah terdigitalisasi dan berjalan konsisten. 3. Kombinasi reward material dan non-material	Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek kepedulian terhadap lingkungan hidup telah dimasukkan ke dalam penilaian perilaku kerja pegawai melalui sistem E-Kinerja yang berbasis digital. Namun demikian, indikator kinerja

No	Indikator	Pertanyaan Wawancara	Reduksi Data	Data Display (Analisis Tematik)	Penarikan Simpulan/ Verifikasi
		2. Bagaimana bentuk penilaian tersebut diterapkan dalam praktik sehari-hari? 3. Apakah terdapat bentuk apresiasi atau penghargaan bagi pegawai yang menunjukkan perilaku kerja ramah lingkungan? 4. Apakah penghargaan tersebut bersifat formal atau informal? 5. Bagaimana pengaruh apresiasi atau penghargaan tersebut terhadap motivasi pegawai?	diinput ke E-Kinerja dan dinilai berdasarkan ekspektasi. 3. Ada 4. Reward formal (E-Kinerja, kenaikan pangkat/gaji) dan informal (pujian langsung). 5. Memberikan motivasi positif dan mendorong perilaku ramah lingkungan. Informan 2 : 1. Lebih masuk ke perilaku kerja, bukan indikator khusus kinerja lingkungan. 2. Dilaporkan bulanan melalui E-Kinerja. 3. Ada 4. Formal (E-Kinerja) dan informal (sanjungan) 5. Memotivasi, jika negatif diberi teguran.	berbasis pendekatan humanis. 4. Reward dan apresiasi meningkatkan disiplin dan perilaku kerja.	hijau belum dirumuskan secara eksplisit sebagai komponen tersendiri dalam sistem penilaian. Aspek lingkungan masih bersifat implisit dan terintegrasi secara normatif dalam kategori perilaku kerja umum. Sistem penilaian kinerja secara administratif telah berjalan dengan baik melalui pelaporan bulanan dan evaluasi berbasis kategori capaian ekspektasi. Selain itu, bentuk penghargaan diberikan secara formal melalui E-Kinerja dan secara informal melalui sanjungan atau apresiasi langsung dari pimpinan. Mekanisme ini terbukti mampu meningkatkan motivasi dan disiplin kerja pegawai.

No	Indikator	Pertanyaan Wawancara	Reduksi Data	Data Display (Analisis Tematik)	Penarikan Simpulan/ Verifikasi
			Informan 3 : 1. Masuk dalam perilaku kerja. 2. Dilaporkan bulanan melalui E-Kinerja dengan kategori kurva (di atas/sesuai/ di bawah ekspektasi) 3. Ada 4. Formal (E-Kinerja) dan informal (sanjungan). 5. Berpengaruh positif terhadap motivasi kerja. Informan 4 : 1. Masuk dalam perilaku kerja dan bersifat informal. 2. Laporan bulanan melalui E-Kinerja. 3. Ada 4. Sanjungan dan penilaian positif; formal melalui E-Kinerja.		Namun demikian, sistem reward tersebut belum dikonstruksi secara strategis sebagai <i>Green Reward System</i> yang secara khusus dirancang untuk mendorong perilaku kerja ramah lingkungan secara terukur. Dengan demikian, meskipun sistem kinerja dan penghargaan telah berjalan efektif secara umum, integrasi prinsip <i>Green HRM</i> dalam sistem evaluasi kinerja masih belum optimal dan belum terstruktur secara konseptual.

No	Indikator	Pertanyaan Wawancara	Reduksi Data	Data Display (Analisis Tematik)	Penarikan Simpulan/ Verifikasi
			5. Berpengaruh terhadap motivasi.		
3	<i>Green Employee Involvement</i>	1. Bagaimana bentuk keterlibatan pegawai dalam program atau kegiatan lingkungan di lingkungan DLH? 2. Apakah partisipasi tersebut bersifat rutin atau hanya pada kegiatan tertentu saja? 3. Bagaimana peran pimpinan dalam mendorong perilaku kerja ramah lingkungan di DLH? 4. Apakah pimpinan memberikan ruang bagi pegawai untuk menyamp	Informan 1 : 1. Pegawai sangat terlibat dalam program lingkungan. 2. Bersifat rutin. 3. Pimpinan sangat berperan dalam mendorong perilaku ramah lingkungan. 4. Pimpinan membuka ruang ide, tetapi inisiatif pegawai masih rendah, terutama pegawai operasional dengan keterbatasan pendidikan. Informan 2 : 1. Ada surat edaran (Jumat Bersih, Hari LH Sedunia), kegiatan massal. 2. Rutin dan insidental	1. Pegawai aktif dalam program lingkungan internal dan eksternal. 2. Kegiatan lingkungan menjadi bagian dari aktivitas kelembagaan. 3. Kepemimpinan menjadi motor penggerak budaya kerja hijau. 4. Kesempatan partisipasi ada, tetapi belum optimal dimanfaatkan.	Temuan penelitian menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan pegawai dalam program dan kegiatan lingkungan di DLH Kota Banjar tergolong tinggi. Pegawai secara aktif terlibat dalam kegiatan seperti program Jumat Bersih, sosialisasi ke sekolah dan masyarakat, serta kegiatan peringatan hari lingkungan hidup. Partisipasi tersebut berlangsung secara rutin dan telah menjadi bagian dari aktivitas kelembagaan sehari-hari. Peran pimpinan dalam mendorong keterlibatan tersebut sangat dominan. Pimpinan tidak hanya memberikan arahan, tetapi

No	Indikator	Pertanyaan Wawancara	Reduksi Data	Data Display (Analisis Tematik)	Penarikan Simpulan/ Verifikasi
		aikan ide atau inovasi lingkungan?	(up to date). 3. Pimpinan sangat berperan (mengkomando dan mengawasi). 4. Pimpinan memberi ruang untuk menyampaikan ide atau inovasi lingkungan Informan 3 : 1. Program edukasi ke sekolah/masyarakat, kegiatan Jumat Bersih. pegawai terlibat aktif. 2. Bersifat rutin. 3. Sangat berperan dalam mendorong perilaku ramah lingkungan. 4. Pimpinan memberi ruang bagi ide pegawai. Informan 4 : 1. Sangat terlibat		juga berperan sebagai role model dalam pelaksanaan kegiatan lingkungan. Selain itu, ruang bagi pegawai untuk menyampaikan ide dan inovasi lingkungan secara normatif telah tersedia. Namun demikian, inisiatif pegawai dalam mengembangkan inovasi lingkungan masih relatif terbatas dan cenderung bergantung pada arahan atasan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun keterlibatan operasional sudah cukup baik, budaya partisipatif berbasis inisiatif kolektif belum sepenuhnya berkembang. Implementasi <i>Green Employee Involvement</i> masih bersifat <i>top-down</i> dan belum sepenuhnya mencerminkan internalisasi

No	Indikator	Pertanyaan Wawancara	Reduksi Data	Data Display (Analisis Tematik)	Penarikan Simpulan/ Verifikasi
			dalam program kebersihan dan sosialisasi. 2. Bersifat rutin. 3. Sangat berperan dan memberi contoh langsung. 4. Pimpinan memberi ruang untuk menyampaikan ide atau inovasi lingkungan		nilai hijau secara mandiri dalam budaya organisasi.

Lampiran 12 Hasil Penelitian Mengenai Keberlanjutan Lingkungan di Dinas
Lingkungan Hidup Kota Banjar

No	Indikator	Pertanyaan Wawancara	Reduksi Data	Data Display (Analisis Tematik)	Penarikan Simpulan/ Verifikasi
1	Kualitas Air	1. Bagaimana praktik penggunaan dan penghematan air bersih di lingkungan kantor DLH? 2. Apakah terdapat kebijakan atau kebiasaan tertentu terkait efisiensi penggunaan air? 3. Bagaimana sistem pengelolaan limbah cair hasil kegiatan operasional di DLH?	Informan 1 : 1. Penggunaan air sudah sangat efisien, pegawai memiliki kesadaran dalam penghematan, air digunakan hanya untuk kebutuhan yang tidak menyebabkan pembengkakan biaya. 2. Terdapat program efisiensi yang mencakup air, listrik, ATK, dan pelaksanaan rapat. 3. Limbah cair berasal dari tinja dan air bersih hasil kegiatan sehari-hari. Informan 2 : 1. Penggunaan air sangat dihemat meskipun jumlah SDM banyak,	1. Menunjukkan bahwa praktik penghematan air telah berjalan secara operasional dan didukung oleh kesadaran kolektif pegawai. 2. Mengindikasikan bahwa penguatan regulasi masih bersifat informal dan belum terdokumentasi secara khusus dalam kebijakan tertulis. 3. Memperlihatkan bahwa limbah cair yang dihasilkan bersifat domestik dan terbatas pada septic tank sehingga tidak terdapat	Berdasarkan triangulasi data dari empat informan, dapat diinterpretasikan bahwa upaya penghematan air di lingkungan DLH telah diterapkan secara efektif dalam aktivitas operasional harian. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih lebih banyak bertumpu pada kebiasaan dan arahan informal, serta belum didukung oleh regulasi tertulis yang secara khusus mengatur efisiensi penggunaan air. Adapun limbah cair yang dihasilkan bersumber dari aktivitas domestik perkantoran, sehingga potensi risiko pencemaran tergolong rendah.

No	Indikator	Pertanyaan Wawancara	Reduksi Data	Data Display (Analisis Tematik)	Penarikan Simpulan/ Verifikasi
			penggunaan air tetap diperhatikan. 2. Terdapat kebiasaan untuk menghemat air. 3. Limbah cair hanya berasal dari septic tank (tinja). Informan 3 : 1. Penggunaan dan penghematan air sudah baik. 2. Tidak ada kebijakan tertulis. dilakukan saling mengingatkan dan terdapat stiker hemat air di setiap keran. 3. Limbah cair hanya berasal dari septic tank (tinja). Informan 4 : 1. Penggunaan dan penghematan air sangat efisien dan digunakan	limbah operasional berisiko tinggi.	

No	Indikator	Pertanyaan Wawancara	Reduksi Data	Data Display (Analisis Tematik)	Penarikan Simpulan/ Verifikasi
			dengan baik. 2. Tidak ada kebijakan formal. terdapat arahan informal dari atasan untuk menghemat air bersih. 3. Limbah cair hanya berasal dari septic tank (tinja).		
2	Efisiensi dan Penggunaan Energi	1. Apakah terdapat kebijakan atau imbauan terkait penghematan energi listrik di lingkungan DLH? 2. Bagaimana penerapan kebijakan tersebut dalam aktivitas kerja sehari-hari? 3. Bagaimana kesadaran pegawai dalam menggunakan listrik dan peralatan	Informan 1 : 1. Terdapat imbauan terkait penghematan energi listrik di lingkungan DLH. 2. Pegawai menggunakan laptop saat bekerja, lampu digunakan di ruangan tertentu saja, memanfaatkan cahaya matahari. 3. Sebagian besar pegawai sudah sadar efisiensi listrik, masih ada	1. Efisiensi energi telah dilembagakan melalui imbauan internal, meskipun belum dalam bentuk regulasi teknis tertulis. 2. Implementasi penghematan dilakukan melalui kontrol penggunaan listrik dan optimalisasi sumber cahaya alami dalam	Berdasarkan hasil triangulasi empat informan, dapat disimpulkan bahwa praktik penghematan energi listrik di lingkungan DLH telah diterapkan melalui imbauan internal dan pembatasan penggunaan listrik sesuai kebutuhan operasional. Implementasi tersebut menunjukkan adanya kesadaran kolektif pegawai, meskipun belum sepenuhnya konsisten pada seluruh individu. Faktor

No	Indikator	Pertanyaan Wawancara	Reduksi Data	Data Display (Analisis Tematik)	Penarikan Simpulan/ Verifikasi
		elektronik secara efisien? 4. Faktor apa yang mempengaruhi perilaku pegawai dalam menghemat energi?	yang mengabaikan. 4. Adanya arahan untuk hemat energi dan sarana prasarana yang mendukung. Informan 2 : 1. Terdapat imbauan penghematan energi listrik. 2. Penggunaan lampu dan kipas angin tidak dinyalakan terus-menerus. 3. Masih banyak pegawai yang belum sepenuhnya sadar. dilakukan saling mengingatkan. 4. Adanya arahan hemat dan sarana prasarana yang mendukung. Informan 3 :	aktivitas kerja. 3. Kesadaran pegawai menunjukkan kecenderungan positif, namun belum sepenuhnya terinternalisasi sebagai budaya kerja kolektif. 4. Perilaku hemat energi bersifat leadership-driven dan didukung oleh ketersediaan sarana prasarana kantor.	utama yang mempengaruhi perilaku efisiensi energi adalah arahan pimpinan serta ketersediaan sarana prasarana yang mendukung, sehingga praktik penghematan energi telah berjalan secara operasional namun masih memerlukan penguatan kedisiplinan dan konsistensi.

No	Indikator	Pertanyaan Wawancara	Reduksi Data	Data Display (Analisis Tematik)	Penarikan Simpulan/ Verifikasi
			1. Terdapat imbauan untuk penghematan energi listrik. 2. Listrik tidak digunakan terus-menerus jika tidak diperlukan. 3. Kesadaran sudah cukup baik tetapi belum sepenuhnya a. dilakukan saling mengingatkan. 4. Adanya arahan hemat dan sarana prasarana yang mendukung. Informan 4 : 1. Terdapat imbauan penghematan energi listrik. 2. Listrik tidak digunakan terus-menerus, penggunaannya lampu dibatasi		

No	Indikator	Pertanyaan Wawancara	Reduksi Data	Data Display (Analisis Tematik)	Penarikan Simpulan/ Verifikasi
			sesuai kebutuhan. 3. Sebagian besar sudah sadar, tetapi masih ada yang mengabaikan. 4. Adanya arahan hemat dan sarana prasarana yang mendukung.		
3	Emisi Gas Rumah Kaca	1. Apakah terdapat upaya untuk mengurangi emisi dari penggunaan kendaraan operasional dinas? 2. Bagaimana efektivitas upaya tersebut dalam praktik? 3. Apakah DLH telah menggunakan teknologi atau peralatan kerja yang ramah	Informan 1 : 1. Terdapat upaya untuk mengurangi emisi dari penggunaan kendaraan operasional dinas. 2. Doser digunakan selama 3 jam per hari; kendaraan dinas digunakan ketika ada keperluan saja. 3. Tersedia alat untuk mengukur polusi udara dan mengecek	1. Pengurangan emisi dilakukan melalui pembatasan operasional kendaraan dinas dan penggunaan secara komunal. 2. Efektivitas upaya lebih bersifat pengendalian operasional dibanding transformasi teknologi rendah emisi secara menyeluruh.	Berdasarkan hasil triangulasi empat informan, dapat disimpulkan bahwa DLH telah melakukan upaya pengurangan emisi gas rumah kaca melalui pengendalian penggunaan kendaraan dinas dan optimalisasi operasional secara komunal. Selain itu, penggunaan peralatan laboratorium dan kendaraan operasional yang ramah lingkungan menunjukkan adanya dukungan

No	Indikator	Pertanyaan Wawancara	Reduksi Data	Data Display (Analisis Tematik)	Penarikan Simpulan/ Verifikasi
		lingkungan? 4. Kendala apa yang dihadapi dalam penerapan teknologi rendah emisi?	kualitas air; kendaraan ramah lingkungan digunakan untuk mengangkut sampah. 4. Sarana prasarana yang digunakan dapat rusak jika terus-menerus digunakan. tidak adanya pembaharuan alat. Informan 2 : 1. Kendaraan dinas digunakan sesuai kebutuhan. tidak digunakan bersamaan. 2. Penggunaan kendaraan dilakukan secara komunal untuk mengurangi emisi dan efisiensi anggaran. 3. Menggunakan alat laboratorium dan kendaraan pengangkut	3. Pemanfaatan alat laboratorium dan kendaraan operasional menunjukkan adanya dukungan teknologi ramah lingkungan 4. Hambatan utama terletak pada keterbatasan anggaran, tingginya biaya bahan bakar berkualitas, dan minimnya pembaruan sarana.	teknologi dalam pengelolaan lingkungan. Namun demikian, implementasi teknologi rendah emisi belum sepenuhnya optimal karena terkendala oleh keterbatasan anggaran, tingginya biaya bahan bakar berkualitas, serta belum adanya pembaruan sarana prasarana secara berkala.

No	Indikator	Pertanyaan Wawancara	Reduksi Data	Data Display (Analisis Tematik)	Penarikan Simpulan/ Verifikasi
			sampah yang ramah lingkungan . 4. Keterbatasan anggaran. bahan bakar berkualitas tinggi lebih mahal. Informan 3 : 1. Terdapat upaya untuk mengurangi emisi kendaraan dinas. 2. Kendaraan digunakan secara komunal dan sesuai kebutuhan tertentu. 3. DLH menggunakan teknologi dan peralatan kerja ramah lingkungan . 4. Kendala anggaran. bahan bakar berkualitas lebih tinggi diperlukan. Informan 4 : 1. Terdapat upaya		

No	Indikator	Pertanyaan Wawancara	Reduksi Data	Data Display (Analisis Tematik)	Penarikan Simpulan/ Verifikasi
			untuk mengurangi emisi kendaraan dinas. 2. Kendaraan digunakan secara komunal untuk mengurangi emisi. 3. Menggunakan teknologi dan peralatan kerja ramah lingkungan. 4. Kendala anggaran dan tidak adanya pembaruan alat.		
4	Pengelolaan Sampah dan Limbah (3R)	1. Bagaimana sistem pemilahan sampah yang diterapkan di lingkungan kantor DLH? 2. Sejauh mana digitalisasi dokumen diterapkan untuk mengurangi penggunaan kertas?	Informan 1 : 1. Disediakan tempat sampah terpisah (organik dan non-organik), sampah plastik dijadikan ecobrick. 2. Dokumen dimasukkan ke aplikasi Srikandi (surat masuk, surat	1. Implementasi prinsip 3R telah berjalan secara konsisten melalui sistem pemilahan sampah terpisah. 2. Terdapat inovasi pengolahan sampah plastik menjadi ecobrick sebagai bentuk	Berdasarkan hasil triangulasi empat informan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah dan limbah di lingkungan DLH telah menerapkan prinsip 3R secara konsisten dan terintegrasi dalam aktivitas operasional. Inovasi pengolahan plastik menjadi

No	Indikator	Pertanyaan Wawancara	Reduksi Data	Data Display (Analisis Tematik)	Penarikan Simpulan/ Verifikasi
		3. Bagaimana partisipasi dan kebiasaan pegawai dalam mengurangi penggunaan plastik sekali pakai?	keluar, disposisi) 3. Pegawai memiliki kebiasaan membawa bekal dan tumbler dari rumah. Informan 2 : 1. Menerapkan 3R; tersedia tempat sampah organik dan non-organik; inovasi ecobrick. 2. Menggunakan aplikasi Srikandi untuk surat masuk, keluar, dan disposisi. 3. Pegawai membawa tempat makan dan tumbler dari rumah. Informan 3 : 1. Menerapkan 3R secara konsisten dan tersedia tempat sampah terpisah. inovasi dari sampah plastik kemasan	nilai tambah pengelola limbah. 3. Digitalisasi administrasi melalui aplikasi Srikandi mendukung pengurangan penggunaan kertas. 4. Partisipasi pegawai dalam pengurangan plastik sekali pakai menunjukkan perubahan perilaku yang relatif terinternalisasi.	ecobrick menunjukkan adanya upaya pemanfaatan kembali limbah secara produktif. Selain itu, digitalisasi administrasi melalui aplikasi Srikandi berkontribusi pada pengurangan penggunaan kertas, sementara kebiasaan pegawai membawa wadah makan dan minum sendiri mencerminkan partisipasi aktif dalam pengurangan plastik sekali pakai. Secara keseluruhan, implementasi pengelolaan sampah di DLH tergolong sistematis dan didukung oleh perilaku pegawai yang relatif adaptif terhadap praktik ramah lingkungan.

No	Indikator	Pertanyaan Wawancara	Reduksi Data	Data Display (Analisis Tematik)	Penarikan Simpulan/ Verifikasi
			menjadi ecobrick. 2. Menggunakan aplikasi Srikandi untuk mengurangi penggunaan kertas. 3. Pegawai membawa tempat makan dan minum dari rumah. Informan 4 : 1. Menerapkan 3R. tersedia tempat sampah organik dan non-organik dan terdapat inovasi sampah plastik kemasan menjadi ecobrick. 2. Menggunakan aplikasi Srikandi untuk layanan berbasis digital dan mengurangi kertas. 3. Pegawai membawa tempat		

No	Indikator	Pertanyaan Wawancara	Reduksi Data	Data Display (Analisis Tematik)	Penarikan Simpulan/ Verifikasi
			makan dan tumbler dari rumah.		
5	Kualitas Udara dan Pengendalian Polusi	1. Bagaimana upaya penataan ruang hijau di lingkungan kantor DLH? 2. Apakah keberadaan tanaman kantor dirasakan memberi dampak terhadap kenyamanan kerja? 3. Apakah terdapat kebijakan kawasan tanpa rokok di lingkungan DLH? 4. Bagaimana pelaksanaan dan pengawasannya di lapangan?	Informan 1 : 1. Terdapat imbauan menanam tanaman dan pohon, bahkan atasan memiliki visi mewujudkan kota lebih bersih dan hijau. 2. Tanaman dirasakan memberikan dampak terhadap kenyamanan kerja. 3. Ada imbauan kawasan tanpa rokok dan penyediaan pojok rokok. 4. Pengawasan dilakukan dengan saling mengingatkan, tidak semua perokok menaati aturan. Informan 2 : 1. Ruang terbuka	1. Penataan ruang hijau dilakukan melalui penanaman tanaman meskipun keterbatasan lahan. 2. Keberadaan tanaman meningkatkan kenyamanan dan kualitas lingkungan kerja. 3. Kebijakan kawasan tanpa rokok telah diterapkan dengan penyediaan area khusus merokok. 4. Pengawasan bersifat persuasif melalui teguran dan kontrol sosial, namun kepatuhan belum sepenuhnya optimal.	Berdasarkan hasil triangulasi empat informan, dapat disimpulkan bahwa upaya pengendalian kualitas udara di lingkungan DLH dilakukan melalui penanaman tanaman sebagai bentuk penghijauan meskipun ruang terbuka hijau terbatas. Keberadaan tanaman memberikan dampak positif terhadap kenyamanan dan suasana kerja. Selain itu, kebijakan kawasan tanpa rokok telah diterapkan dengan menyediakan pojok rokok sebagai area khusus. Namun demikian, pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif karena masih ditemukan pelanggaran, sehingga

No	Indikator	Pertanyaan Wawancara	Reduksi Data	Data Display (Analisis Tematik)	Penarikan Simpulan/ Verifikasi
			hijau terbatas. dilakukan penanaman tanaman di sekitar kantor. 2. Tanaman dirasakan memberi dampak terhadap kenyamanan kerja. 3. Tersedia pojok rokok. masih ada yang merokok sembarangan. 4. Pelanggar mendapat teguran. dilakukan saling mengingatkan. Informan 3 : 1. Ruang terbuka hijau terbatas, dilakukan penanaman tanaman di sekitar kantor. 2. Tanaman memberi dampak kenyamanan lingkungan menjadi		pengawasan masih bergantung pada mekanisme teguran dan saling mengingatkan antarpegawai.

No	Indikator	Pertanyaan Wawancara	Reduksi Data	Data Display (Analisis Tematik)	Penarikan Simpulan/ Verifikasi
			sejuk dan teduh. 3. Tersedia pojok rokok tetapi masih ada yang pelanggaran. 4. Pelanggar mendapat teguran dan saling mengingatkan. Informan 4 : 1. Ruang terbuka hijau terbatas. dilakukan penanaman tanaman di sekitar kantor. 2. Tanaman memberi dampak terhadap kenyamanan kerja. 3. Tersedia pojok rokok. masih ada pelanggaran. 4. Pelanggar mendapat teguran dan saling mengingatkan.		
6	Konservasi Keanekara	1. Bagaimana keterlibatan	Informan 1 : 1. Pegawai terlibat	1. Keterlibatan pegawai dalam	Berdasarkan hasil triangulasi empat informan,

No	Indikator	Pertanyaan Wawancara	Reduksi Data	Data Display (Analisis Tematik)	Penarikan Simpulan/ Verifikasi
	gaman Hayati	n pegawai dalam program penghijauan atau konservasi lingkungan? 2. Apakah kegiatan tersebut menjadi bagian dari tugas rutin atau bersifat insidental? 3. Apakah pegawai DLH terlibat dalam kegiatan edukasi lingkungan kepada masyarakat? 4. Bagaimana bentuk peran pegawai dalam kegiatan tersebut?	dalam pengelolaan Taman Kehati dan program Jumat Bersih. 2. Kegiatan menjadi bagian dari tugas rutin. 3. Pegawai melakukan sosialisasi ke masyarakat, sekolah, Adiwiyata, SPPG. 4. Pegawai antusias memberikan arahan materi edukasi. Informan 2 : 1. Memiliki Taman Kehati yang dirawat dan dijaga kelestariannya. 2. Bersifat rutin. 3. Pegawai terlibat dalam sosialisasi berdasarkan surat edaran instansi. 4. Pegawai antusias memberikan	konservasi diwujudkan melalui pengelolaan Taman Kehati dan kegiatan lingkungan rutin. 2. Program konservasi telah terintegrasi dalam tugas kerja dan tidak bersifat insidental. 3. Pegawai berperan aktif dalam edukasi lingkungan kepada masyarakat berbagai kelompok masyarakat. 4. Peran edukatif bersifat komunikatif dan partisipatif, menunjukkan komitmen terhadap penyadaran lingkungan.	dapat disimpulkan bahwa keterlibatan pegawai DLH dalam konservasi keanekaragaman hayati tergolong aktif dan terstruktur, terutama melalui pengelolaan Taman Kehati dan pelaksanaan kegiatan rutin lingkungan. Selain itu, pegawai juga berperan sebagai agen edukasi lingkungan kepada masyarakat, sekolah, dan program terkait, dengan pendekatan yang komunikatif dan antusias. Hal ini menunjukkan bahwa aspek konservasi dan edukasi lingkungan telah menjadi bagian integral dari pelaksanaan tugas kelembagaan DLH.

No	Indikator	Pertanyaan Wawancara	Reduksi Data	Data Display (Analisis Tematik)	Penarikan Simpulan/ Verifikasi
			n edukasi kepada masyarakat dan pelajar. Informan 3 : 1. Pegawai sangat terlibat; terdapat Taman Kehati yang dirawat dan dijaga. 2. Bersifat rutin. 3. Pegawai terlibat dalam edukasi ke masyarakat, sekolah, dan SPPG. 4. Pegawai antusias dalam memberikan edukasi agar masyarakat memahami pentingnya menjaga lingkungan. Informan 4 : 1. Pegawai sangat terlibat. terdapat Taman Kehati yang dirawat dan dijaga. 2. Bersifat Rutin		

No	Indikator	Pertanyaan Wawancara	Reduksi Data	Data Display (Analisis Tematik)	Penarikan Simpulan/ Verifikasi
			3. Pegawai terlibat dalam edukasi ke masyarakat, sekolah, dan SPPG. 4. Pegawai memberikan arahan edukasi dengan baik sehingga mudah dipahami.		
7	Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan	1. Apakah dalam pengadaan barang dan jasa telah mempertimbangkan aspek ramah lingkungan? 2. Apakah terdapat inovasi dalam pemanfaatan sumber daya alam atau sarana kantor secara bijak? 3. Apa kendala utama dalam menerapkan prinsip pemanfaatan sumber daya	Informan 1 : 1. Pengadaan sangat mempertimbangkan aspek ramah lingkungan dan kebutuhan keberlanjutan. 2. Digitalisasi administrasi, menghemat penggunaan lampu LED, pengaturan listrik otomatis, efisiensi air dan peralatan. 3. Anggaran terbatas, kesadaran sebagian pegawai, regulasi	1. Pengadaan barang dan jasa telah mengarah pada prinsip ramah lingkungan, meskipun belum sepenuhnya terstandarisasi secara optimal. 2. Inovasi pemanfaatan sumber daya dilakukan melalui digitalisasi, efisiensi energi, dan optimalisasi umur pakai sarana. 3. Implementasi keberlanjutan	Berdasarkan hasil triangulasi empat informan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan di lingkungan DLH telah mulai diintegrasikan dalam proses pengadaan barang dan jasa serta praktik operasional melalui digitalisasi, efisiensi energi, dan optimalisasi pemanfaatan sarana. Meskipun demikian, implementasinya belum sepenuhnya optimal karena

No	Indikator	Pertanyaan Wawancara	Reduksi Data	Data Display (Analisis Tematik)	Penarikan Simpulan/ Verifikasi
		secara berkelanjutan?	teknis terbatas, perubahan budaya kerja membutuhkan waktu dan komitmen pimpinan Informan 2 : 1. Pengadaan mempertimbangkan prinsip efisiensi sumber daya, pengurangan emisi, dan produk bersertifikasi lingkungan . menjadi komitmen jangka panjang. 2. Pengurangan kertas melalui surat elektronik, pengaturan penggunaan listrik dan pemeliharaan sarana kantor. 3. Keterbatasan regulasi teknis; sinkronisasi kebijakan antar unit, peningkatan	an menghadapi kendala struktural (anggaran, regulasi, penyedia barang) dan kultural (kesadaran serta perubahan kebiasaan kerja).	masih menghadapi kendala anggaran, keterbatasan regulasi teknis, harga produk ramah lingkungan yang relatif tinggi, serta tantangan peningkatan kapasitas SDM dan perubahan budaya kerja. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen terhadap prinsip keberlanjutan telah ada, namun memerlukan penguatan sistemik agar dapat berjalan secara lebih terstruktur dan konsisten.

No	Indikator	Pertanyaan Wawancara	Reduksi Data	Data Display (Analisis Tematik)	Penarikan Simpulan/ Verifikasi
			n kapasitas SDM diperlukan. Informan 3 : 1. Mempertimbangkan seleksi barang hemat energi, pengurangan bahan sekali pakai dan efisiensi ATK. 2. Pengurangan kertas melalui surat elektronik, pengaturan penggunaan listrik, pemeliharaan sarana agar umur pakai lebih panjang. 3. Harga produk ramah lingkungan lebih tinggi, keterbatasan penyedia barang standar hijau. Informan 4 : 1. Pengadaan ramah lingkungan mulai diterapkan, namun		

No	Indikator	Pertanyaan Wawancara	Reduksi Data	Data Display (Analisis Tematik)	Penarikan Simpulan/ Verifikasi
			belum sepenuhnya optimal. 2. Penggunaan sistem digital untuk laporan, pembatasan listrik, pemanfaatan kembali perlengkapan yang masih layak. 3. Kurangnya sosialisasi dan pelatihan, kebiasaan kerja lama sulit diubah.		

Lampiran 13 Data Pendukung Profil DLH Kota Banjar

Visi dan Misi

VISI

"Banjar Masagi" adalah visi Kota Banjar untuk periode 2025-2030, yang merupakan singkatan dari "Maju, Adil, Sejahtera, Agamis, dan Inovatif".

Visi ini mencerminkan harapan untuk membangun masyarakat Banjar yang berdaya dan unggul di berbagai bidang.



MISI

- ✓ Meningkatkan Sumber Daya Manusia, kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama yang berdaya saing dan berakhlak mulia.
- ✓ Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan perekonomian dan yang berkeadilan.
- ✓ Meningkatkan aksesibilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, akuntabel dan transparan berbasis teknologi
- ✓ Meningkatkan koordinasi antar pihak internal maupun eksternal untuk percepatan pembangunan dan kondusivitas daerah
- ✓ Menciptakan kesempatan bagi peserta untuk berinteraksi, berkolaborasi, dan membangun hubungan dengan sesama calon pengusaha, mentor, dan investor.
- ✓ Menginspirasi peserta untuk berpikir inovatif dan kreatif dalam merancang proposal bisnis yang menarik dan berbeda dari yang lain.
- ✓ Menginspirasi peserta untuk berpikir inovatif dan kreatif dalam merancang proposal bisnis yang menarik dan berbeda dari yang lain.

Tugas dan Fungsi

Tugas

Membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pertanahan dan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.



Fungsi

- 1 Perumusan kebijakan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan pertanahan dan urusan lingkungan hidup;
- 2 Pelaksanaan kebijakan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan pertanahan dan urusan lingkungan hidup;
- 3 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan pertanahan dan urusan lingkungan hidup;
- 4 Pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup;
- 5 Pembinaan ASN pada Dinas Lingkungan Hidup; dan
- 6 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.



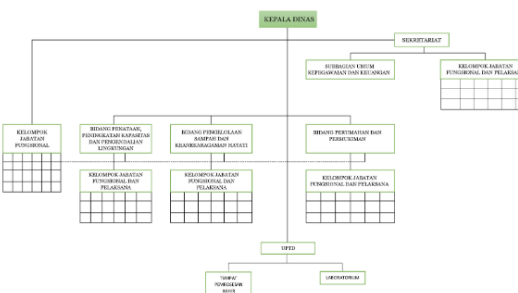
Struktur Organisasi

- ✓ Pimpinan: Kepala Dinas, bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretariat Daerah

- ✓ Susunan:

- Sekretariat: Sub Bagian Umum & Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan
- Bidang Penataan, Peningkatan Kapasitas, dan Pengendalian Lingkungan
- Bidang Pengelolaan Sampah dan Keanekaragaman Hayati
- Bidang Perumahan dan Permukiman

Struktur Organisasi



- UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup
- UPTD TPA

Lampiran 14 Dokumentasi Hasil Penelitian



Edukasi Tentang Lingkungan Pada Saat Apel Pagi



Efisiensi Energi Listrik Dengan Lebih Menggunakan Laptop



Himbauan Efisiensi Air



Pojok Rokok



Himbauan Energi Listrik



Pemanfaatan Cahaya Alami



Tempat Sampah Terpisah



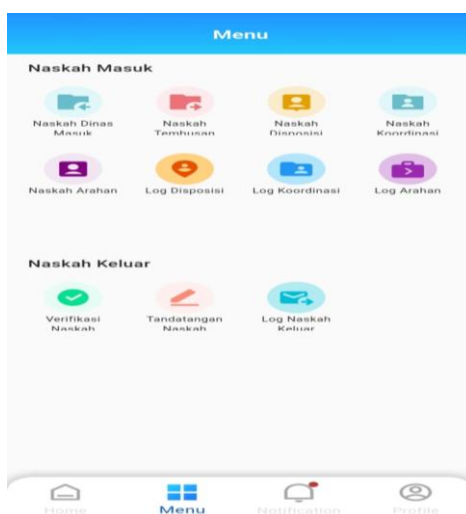
Taman Kantor yang hijau



Keterlibatan Karyawan dalam penghijauan



Pemilahan Sampah Anorganik



Menu Aplikasi Srikandi (Efisiensi Penggunaan Kertas)



Pemanfaatan Sampah Plastik Menjadi Ecobrik

Lampiran 15 Dokumentasi Dengan Narasumber



Narasumber 1 : Kepala Dinas



Narasumber 3 : Kasubag Umum



Narasumber 2 : Kepala Bidang LH



Narasumber 4 : Pegawai Fungsional